

**TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA MARIO KECAMATAN KULO  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Nurul Ameliah<sup>1</sup>, Abdul Jabbar<sup>2</sup>, Nurjannah Nonci<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: nurulamelhia001@gmail.com

**ABSTRACT**

This research aims to determine the transparency of the village government and the management of direct cash assistance in Mario Village, as well as the influence of village government transparency on the management of direct cash assistance in Mario Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency. The independent variable used is village government transparency and the dependent variable used is the management of direct cash assistance. The sampling technique in this research is based on a saturated sampling technique or the entire population is used as a sample because the population is less than 100, namely 58 recipients of direct cash assistance. This type of research is quantitative descriptive. The data collection techniques used were observation, literature study, and questionnaires. The data analysis technique uses descriptive statistical analysis, validity test, reliability test, and simple linear regression analysis which is processed using the SPSS type 21 application. The results of this research show that village government transparency (X) was obtained with a percentage of 66%, indicating that transparency is quite good, indicating that there is a significant effort from the village government to strive for clear and easy transparency. However, further evaluation is still needed on what factors can increase transparency. For the management of direct cash assistance (Y), the resulting percentage of 71% is quite good, although there is still room to reach a higher level with further evaluation to help identify areas that need improvement. In addition, the significance value of  $t_{count}$  is greater than  $t_{table}$  ( $3,458 > 1,671$ ), so it can be concluded that  $H_a$  is accepted and  $H_o$  is rejected, so that village government transparency has a positive and significant effect on the management of direct cash assistance in Mario Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency.

**Keywords:** Transparency, Village Government, Management of Direct Cash Assistance.

**ABSTRAK**

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pemerintah desa dan pengelolaan bantuan bantuan langsung tunai di Desa Mario, serta pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Variabel *independent* yang digunakan adalah transparansi pemerintah desa dan variabel *dependent* yang digunakan adalah pengelolaan bantuan langsung tunai. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik sampling jenuh atau semua populasi dijadikan sebagai sampel karena populasi kurang dari 100 yakni 58 penerima bantuan langsung tunai. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi pustaka, dan kuesioner atau angket. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif statistik, uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier sederhana yang diolah menggunakan aplikasi SPSS type 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, transparansi pemerintah desa (X) diperoleh dengan persentase 66% menunjukkan bahwa transparansi yang cukup baik, menandakan bahwa ada upaya yang signifikan dari pemerintah desa untuk mengupayakan transparansi yang jelas dan mudah. Namun, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor apa saja yang dapat meningkatkan transparansi tersebut. Untuk pengelolaan bantuan langsung tunai (Y) dihasilkan dengan persentase 71% telah cukup baik, meski masih ada ruang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan evaluasi lebih lanjut untuk membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, nilai signifikansi  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,458 > 1,671$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, sehingga transparansi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Kata kunci:** Transparansi, Pemerintah Desa, Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai.

## PENDAHULUAN

Penanganan kemiskinan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil termasuk di daerah pedesaan. Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih besar dibandingkan penduduk miskin dikota. Pemerintah menerapkan berbagai macam program bantuan dan subsidi dari berbagai bidang untuk pemenuhan kebutuhan dasar, reduksi beban tanggungan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Program tersebut dapat dijumpai dari bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Bantuan sosial yang sudah diterapkan saat ini, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai, dan beberapa program lainnya.

Kemunculan wabah penyakit global atau pandemi, yakni Corona Virus Disease (Covid-19), membuat sebagian besar negara di belahan dunia mengalami krisis dari berbagai sektor. Covid-19 terdeteksi perdana di kota Wuhan, China tepatnya di bulan Desember 2019. Virus ini membuat penderitanya demam hingga infeksi pada pernafasan. Kemunculan dan penyebarannya yang begitu cepat, membuat para tim medis dan pemerintah dibuat kewalahan, karena kurangnya fasilitas kesehatan yang tersedia, sedangkan orang yang terjangkit virus ini terus meningkat setiap harinya. Angka kematian juga kian ikut bertambah dari berbagai usia, mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia.

Salah satu negara yang terdampak dari virus ini adalah Indonesia, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah mengkonfirmasi 2 orang terjangkit virus Covid-19. Diseminasi virus ini hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, sehingga peristiwa tersebut ditetapkan sebagai bencana non-alam yang menelan banyak korban jiwa. Wabah Covid-19 memberikan pengaruh dominan bagi aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat selain pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat.

Dampak dari aspek ekonomi dapat dilihat dari kegiatan di pasar tradisional yang sebelumnya bebas bertransaksi, namun adanya pandemi membuat banyak pedagang pada sektor informal gulung tikar. Pada aspek sosial dapat ditemukan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau pembatasan interkasi sosial antar individu yang melahirkan kebiasaan atau budaya baru di masyarakat dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan, serta adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menambah angka pengangguran yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Indonesia juga meningkat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara yang memuat bahwa untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional pemerintah memprioritaskan biaya belanja negara terhadap belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian dunia usaha dan masyarakat terdampak, hal ini melahirkan instrumen baru dalam meminimalisir dampak Covid-19 terhadap stabilitas perekonomian desa. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 menjadi landasan utama bagi pemerintah membuat kebijakan baru terkait Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD). Pelaksanaan bantuan tersebut telah dilakukan sejak bulan April tahun 2020.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbentuk atas inisiatif Bapak Jusuf Kalla yang pertama kali di Indonesia pada tahun 2005, setelah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Jusuf Kalla dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2004. Kemudian, melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak bersyarat dilaksanakan sejak bulan Oktober tahun 2006 hingga Desember 2006. Program tersebut berlanjut di tahun 2008 dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 dimana diberikan selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah nominal sebesar Rp700.000. Selanjutnya pada tahun 2013, program tersebut berubah nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT dijalankan oleh pemerintah sebagai jawaban atas kenaikan harga Bahan Bakar

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



Minyak (BBM) di dunia pada saat itu. Tujuan utama dari program BLT yaitu membantu masyarakat miskin agar dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. (Sofi, 2021)

Regulasi terkait BLT-DD diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di tahun 2020. Secara umum, gambaran dari regulasi tersebut adalah “prioritas penggunaan dana desa”, artinya dana desa dapat digunakan pada penanggulangan Covid-19 dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. (Ndoda, 2022).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan sosial berbentuk uang tunai yang berasal dari Dana Desa. Dana desa yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan tersebut menyasar kepada masyarakat miskin dan rentan menghadapi kesulitan untuk meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari saat terjadi pandemi Covid-19 guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. BLT-DD berbeda dengan bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, dan BST. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyasar keluarga miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak usia sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui yang diberikan dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan komponen masing-masing. Pencairan PKH berupa uang tunai melalui Kantor Pos dan Bank Himbara (BRI, BNI, MANDIRI, BTN).

Tahun 2023 dengan pertimbangan dari berbagai aspek, termasuk kondisi perkembangan harian Covid-19 yang semakin mendekati nihil, kemudian masyarakat juga telah memiliki imunitas kuat, salah satunya dengan pemberian vaksinasi. Hal tersebut digambarkan berdasarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa 99% masyarakat Indonesia telah memiliki antibody covid. Pemerintah kemudian mencabut status pandemi dan menjadi endemi tepatnya pada tanggal 21 Juni 2023 setelah 3 tahun melawan wabah virus Covid-19. Hal ini membuat BLT-DD tidak lagi diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, namun lebih diprioritaskan pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrim di desa.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki sebagian besar memiliki masalah sosial, yakni kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, tetapi dialami juga oleh negara-negara maju. Pemerintah desa sebagai aktor utama pada pengelolaan dana desa dan memiliki ruang yang luas untuk berinteraksi dengan masyarakat harus memfokuskan penggunaan dana desa untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan dana desa dapat tercapai. Data calon penerima BLT-DD harus sesuai dengan metode perhitungan yang sudah ditetapkan.

Pendistribusian BLT-DD dilaksanakan terhitung sejak April 2020 senilai Rp600.000/keluarga untuk tiga bulan pertama (April, Mei, Juni), tahap kedua senilai Rp300.000/bulan/keluarga (Juli, Agustus, September), tahap ketiga dengan jumlah yang sama berlaku tiga bulan kedepan (Oktober, November, Desember), dan masih terlaksana sampai tahun 2023. Bantuan tersebut bisa saja bertambah apabila Kepala Desa mengusulkan alokasi dana desa kepada Bupati/Walikota, namun harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia yang ditandatangani oleh presiden Joko Widodo tanggal 8 Juni 2022 yang berlaku hingga 31 desember 2024. Jika merujuk pada Instruksi Presiden tersebut, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa masih terus berlanjut sampai akhir tahun 2024. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dialokasikan maksimal 25% dan minimal 10% dari total pagu Dana Desa yang diberikan dari masing-masing desa.

Program BLT-DD terdistribusi kepada masyarakat miskin sejak pandemi hingga menjadi status endemi melalui pemerintah desa. Tujuan utama dari program BLT-DD adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam menopang perekonomian dan kebutuhan sehari-harinya agar tetap bertahan hidup. Selain itu, program BLT-DD juga berperan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ekstrim

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



yang ada di desa. Program bantuan yang dicanangkan tersebut, tentu diharapkan dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dalam pengentasan kemiskinan ekstrim.

Pemerintah desa dituntut melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menunjukkan bahwa desa memiliki otoritas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Terkait hal ini, pemerintah desa wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), salah satunya dengan menerapkan prinsip transparansi, yakni memberikan informasi yang nyata dan terbuka kepada publik.

Pengelolaan dana desa sangat penting menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dalam memenuhi amanat yang dituangkan kepada rakyat. Untuk itu, dengan adanya penerapan prinsip transparansi, pemerintah desa dapat lebih berhati-hati dan melaksanakan tugasnya secara baik dengan mengedepankan transparansi tersebut, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dan manfaat melalui pemanfaatan dana desa tersebut. Transparansi pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau publik untuk mendapatkan informasi yang terbuka terkait pengelolaan dana desa. Dengan adanya modalitas transparansi pemerintah, maka masyarakat suatu desa dapat dibangkitkan. Masyarakat desa harus diberdayakan pada pengelolaan “Dana Desa” dengan mekanisme transparansi sebagai instrumen partisipasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Hak-hak warga negara menjadi perhatian dan ukuran kualitas demokrasi di setiap negara. Warga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan warga dan masyarakat. Keuangan yang dialokasikan pemerintah juga harus diinformasikan secara terbuka (transparan) agar warga dapat menilai kecukupan atau kekurangan untuk membiayai kebijakan, program, dan kegiatan.

Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu desa di Indonesia yang terdampak Covid-19 hingga tahun 2023 telah mengikuti dan menjalankan arahan dari pemerintah dalam penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat. Anggaran Dana Desa di Desa Mario untuk tahun 2023 sebesar Rp838.907.000 dan digunakan sebesar Rp208.800.000 untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 58 orang penerima. Bantuan disalurkan secara tunai dengan mengumpulkan masyarakat di balai kantor desa melalui informasi dari masing-masing 4 kepala dusun yang ada di Desa Mario.

Berdasarkan, sumber data dari Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BLT-DD dari tahun 2020 sampai tahun 2023, digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Penerima BLT Dana Desa di Desa Mario Tahun 2020-2023 Jumlah Penerima BLT Dana Desa di Desa Mario Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Jumlah Penerima BLT Dana Desa
1	2020	139 KPM
2	2021	40 KPM
3	2022	90 KPM
4	2023	58 KPM

Sumber: Kantor Desa Mario

Berdasarkan observasi awal penulis, informasi dari aparat desa bahwa pengurangan jumlah penerima bantuan berdasarkan tabel, karena adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah berpindah tempat atau domisili, meninggal dunia, juga skala prioritas yang berbeda sesuai Peraturan

Menteri Desa (Permendes). Namun, alasan pengurangan tersebut tidak diketahui banyak oleh masyarakat sehingga menimbulkan tanda tanya dan menganggap penghapusan daftar penerima dilakukan secara sepihak.

Sebagian besar masyarakat juga belum mengetahui berapa besar anggaran Bantuan Langsung Tunai untuk Desa Mario, mekanisme penyalurannya, serta syarat-syarat yang berhak menerima bantuan, sehingga terkadang menimbulkan pertanyaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh masyarakat Desa Mario, yang mengatakan bahwa “model penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan mekanisme untuk memperoleh bantuan tersebut tidak diketahui masyarakat secara luas, sehingga menganggap semua masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin mendapatkan bantuan tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sehingga menganggap bantuan tersebut diperuntukkan untuk semua masyarakat tergolong keluarga miskin.

Publikasi dana desa tidak hanya dengan pembuatan baliho dan papan pengumuman saja yang diletakkan di ruang publik dan penempatan penggunaan dana desa di kantor desa yang berbasis konvensional, tetapi publikasi dana desa juga dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital yang ada seperti website desa. Informasi yang diberikan melalui website Desa Mario terbilang masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari program bantuan yang terlaksana seperti PKH, BPNT, dan termasuk BLT-DD itu sendiri tidak tertera secara detail di Website Desa Mario yang menggunakan aplikasi Siberas sebagai layanan informasi berbasis digital, dimana aplikasi tersebut diharapkan memberikan akses informasi yang lengkap dan mudah dijangkau oleh publik. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 11 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik secara berkala terkait program/kegiatan meliputi nama program/kegiatan, penanggungjawab program/kegiatan, target dan capaian program/kegiatan, jadwal pelaksanaan, anggaran program/kegiatan (sumber dan jumlahnya), serta informasi khusus lain yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat.

Adanya transparansi pengelolaan keuangan dana desa akan membuat tingkat penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi menjadi lebih minim, karena masyarakat bisa memantau/mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa sehingga kecenderungan aparatur desa untuk berbuat curang menjadi lebih kecil. Apabila pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, tentu dana desa tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik sampling jenuh atau semua populasi dijadikan sebagai sampel karena populasi kurang dari 100 yakni 58 penerima bantuan langsung tunai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi pustaka, dan kuesioner atau angket. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif statistik, uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier sederhana yang diolah menggunakan aplikasi SPSS type 21.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai

Douglas dan Meijer (2016), mengemukakan bahwa tersedianya informasi terkait segala kegiatan organisasi publik, memungkinkan pihak eksternal dari organisasi untuk mengawasi serta menilai kinerja dari organisasi tersebut. Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan BLT-DD sangat membantu masyarakat untuk mengetahui mengenai data keluarga penerima manfaat, besaran bantuan, dan besaran alokasi bantuan yang di anggarkan untuk BLT-DD. Transparansi pada setiap kegiatan pengelolaan terkait kepentingan secara luas akan membuat masyarakat memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga, masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada atau tidak tindakan korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



menentukan tingkat kepatuhan pengelola dana publik terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. (Lianingrum & Mimba, 2023).

Pengelolaan BLT-Dana Desa di tingkat pemerintahan desa sangat penting dalam menerapkan prinsip transparansi bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah untuk menjalankan amanat rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan, dengan demikian transparansi pengelolaan keuangan desa tentang BLT-DD menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi semakin transparan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya maka semakin mudah untuk mewujudkan good government (tata kelola pemerintah yang baik). (Siswanto et al., 2022). Oleh karena itu, adanya penerapan prinsip transparansi, pemerintah desa dapat lebih berhati-hati dan melaksanakan tugasnya secara baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance yang salah satunya adalah prinsip transparansi, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dan manfaat melalui pemanfaatan dana desa tersebut.

**Tabel: 1. Rekapitulasi Indikator Transparansi Pemerintah Desa**

No	Indikator Transparansi Pemerintah Desa	Rata-rata presentase
1.	Informasi yang memadai	65%
2.	Informasi mudah didapat	65%
3.	Media informasi yang baik	61%
4.	Sikap terbuka pemerintah	74%
	Jumlah	265/4
	Presentase	66%

Akumulasi hasil rata-rata presentase dari tujuh item pertanyaan pada indikator Transparansi Pemerintah Desa diperoleh jumlah rata-rata presentase yaitu 66%. Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator tersebut berada pada kategori “Baik”. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi terutama dalam memberikan informasi terbaru, memanfaatkan media cetak atau elektronik sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**Tabel: 2. Rekapitulasi Indikator Pengelolaan**

No	Indikator Pengelolaan	Rata-rata presentase
1.	Perencanaan	73%
2.	Pengorganisasian	64%
3.	Pelaksanaan	73%
4.	Pengawasan	73%
	Jumlah	283/4
	Presentase	71%

Akumulasi hasil rata-rata presentase dari sembilan item pertanyaan pada indikator pengelolaan Blt-dd diperoleh jumlah rata-rata presentase yaitu 71%. Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator tersebut berada pada kategori “Baik”. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah desa dalam mengelola bantuan terutama koordinasi atau hubungan dengan masyarakat untuk dapat ditingkatkan lagi, sehingga pemerintah desa dapat dengan mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat, salah satunya dalam bentuk sosialisasi.

Tabel: 3. One-Sample Test

Variabel	Test Value = 58					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	58% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Transparansi	47.546	57	.000	22.810	22.42	23.20

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21, 2024

Tabel di atas menunjukkan nilai statistik  $t_{hitung} = 47.546$ , df (degree of freedom/derajat keabsahan) = 57, Sig. (2-tailed) = 0.000 (signifikansi dengan uji 2 pihak). Dari hasil yang telah diperoleh, untuk membuat keputusan apakah hipotesis yang dibuat diterima atau ditolak, maka menggunakan rumus berikut:

- $H_a : \mu \geq 70\%$
- $H_o : \mu \leq 70\%$

**Kaidah Keputusan:**

- Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.
- Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Apabila dilihat nilai  $t_{hitung}$  pada tabel *One Sample Test* di tabel t, berdasarkan hasil analisis SPSS  $t_{hitung} = 47.546$  dengan taraf signifikan  $\alpha = 0.000$ . carilah  $t_{tabel}$  untuk uji 2 pihak menggunakan rumus :  $df = N - 2 = 58 - 2 = 56$  sehingga nilai  $t_{tabel} = 1.671$ .

Hasilnya  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  atau  $47.546 \geq 1.671$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, artinya faktor transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa mario tidak sebesar 70% dari rata-rata nilai ideal sebesar 81.2% .

Tabel: 4. Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.295	4.189		1.980	.053
Transparansi	.454	.130	.422	3.485	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai  
 Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2024

Sesuai tabel hasil uji *Coefficients* di atas, dapat dikemukakan bahwa nilai konstanta (a) = 8.295 dan beta = 0.454, sedangkan hasil  $t_{hitung}$  dan tingkat signifikansi = 0.001. Jadi, model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Mario, dapat dianalisis berdasarkan koefisien sebagai berikut :

$$Y = 8.295 + 0.454 X$$

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



Berdasarkan fungsi regresi diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Apabila variabel Transparansi Pemerintah Desa (X) berubah, variabel Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (Y) juga ikut berubah. Hal ini menunjukkan perubahan positif yang searah. Jika Transparansi Pemerintah Desa meningkat, maka Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai juga akan meningkat dengan koefisien regresi sebesar 0.454 dan sebaliknya, jika Transparansi Pemerintah Desa menurun, Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai juga ikut menurun dengan koefisien regresi 0.454.
- Nilai konstanta sebesar 8.295 menunjukkan jika semua variabel konstan, maka transparansi masih bersifat positif.
- Berdasarkan nilai beta 0.454, diketahui bahwa variabel Transparansi Pemerintah Desa (X) memiliki pengaruh dominan terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (Y), berdasarkan nilai beta yang besar.

**Tabel: 5. ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	135.589	1	135.589	12.142	.001 <sup>b</sup>
Residual	625.325	56	11.167		
Total	760.914	57			

a. Dependent Variable: Transparansi

b. Predictors: (Constant), Pengelolaan

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21, 2024

Berdasarkan hasil uji *Anova*, nilai  $F_{hitung} = 12.142$  dengan tingkat probabilitas Sig. 0.001. Oleh karena probabilitas  $0.001 \leq 0.05$ , maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau signifikan, maka dapat dilihat dari level of signifikan  $\alpha = 0,05$ . Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0.05  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Hasil olah data pada tabel *Anova* diatas menunjukkan nilai  $F_{hitung} = 12.142$  dengan tingkat signifikan  $0.001 < 0.05$  yang artinya variabel Transparansi Pemerintah Desa (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (Y). Artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai.

Uji statistik (Uji-t) untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel *independent*/penjelas secara individual menerangkan variasi variabel *dependent*. Berdasarkan hasil olah data pada tabel *coefficients*, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel Transparansi Pemerintah Desa (X) sebesar 3.485 dengan tingkat signifikan 0.001.

**Kaidah keputusan :**

- Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya Signifikan
  - Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak Signifikan.
- Sehingga, hasil dari tabel *Coefficients* diperoleh  $t_{hitung} = 3.485$  prosedur untuk mencari statistik tabel dengan kriteria
- Tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) untuk uji dua pihak
  - Df atau dk (derajat keabsahan) = N (jumlah data) – 2 = 58 – 2 = 56
  - Sehingga diperoleh  $t_{tabel} = 1.671$

**Keputusan :**

Hasilnya nilai  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  atau  $3.458 \geq 1.671$ , berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, berarti signifikan. Jadi, Transparansi Pemerintah Desa berpengaruh Signifikan terhadap Pengelolaan Banantuan Langsung Tunai di Desa Mario.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



Indikator transparansi pemerintah desa dikemukakan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang terdiri atas 4, yaitu informasi yang memadai, informasi mudah didapat, media informasi yang baik, dan sikap terbuka pemerintah.

a. Informasi yang memadai

Menurut Bappenas Informasi yang memadai yaitu ketersediaan informasi publik yang selalu terbaru mengenai setiap proses dan penerapan kebijakan berupa data dan dokumen secara lengkap.

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.6 yaitu tanggapan responden tentang pemerintah desa menyediakan informasi tentang Blt-dd (data/jumlah penerima dan jumlah anggaran dana desa untuk Blt-dd) dengan persentase 80% dan tabel 4.7 yaitu Tanggapan responden informasi tentang Blt-dd selalu terbaru dan lengkap di media pengumuman/informasi dengan persentase 50%, sehingga hasil rekapitulasi dari keduanya diperoleh dengan persentase 65%.

b. Informasi mudah didapat

Menurut Bappenas informasi mudah didapat yaitu kemudahan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.8 tanggapan responden tentang pemerintah desa menyediakan akses terbuka untuk memeriksa alokasi dana desa penggunaan Blt-dd dengan persentase 70% dan pada tabel 4.9 tanggapan responden tentang informasi tentang Blt-dd mudah diakses dengan persentase 60%, sehingga hasil rekapitulasi dari keduanya yaitu 65%.

c. Media informasi yang baik

Menurut Bappenas, media informasi yang baik yaitu informasi yang disediakan pemerintah dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik, seperti Website desa, baliho, papan pengumuman ataupun media informasi lainnya yang dapat memudahkan untuk diakses.

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.10 tanggapan responden tentang pemerintah desa menggunakan situs internet (website desa) sebagai media informasi resmi kepada masyarakat dengan persentase 70% dan tabel 4.11 tanggapan responden tentang pemerintah desa memasang papan pengumuman, baliho, banner, dan media cetak lainnya di halaman kantor desa tentang Blt-dd dengan persentase 52%, sehingga hasil rekapitulasi dari keduanya yaitu 61%.

d. Sikap terbuka pemerintah

Menurut Bappenas sikap terbuka pemerintah yaitu aparatur pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan desa wajib menyampaikan informasi yang benar tanpa adanya yang ditutupi sesuai dengan hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.12 tanggapan responden tentang pemerintah desa memberikan informasi yang terbuka dan jujur apabila masyarakat memerlukan informasi tentang Blt-dd dengan persentase 74%.

1. Indikator pengelolaan bantuan langsung tunai menggunakan teori dari George R. Terry bahwa di dalam manajemen terdapat planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan).

a. Perencanaan

Menurut George R. Terry, perencanaan adalah Menurut Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.14 tanggapan responden tentang pemerintah desa mengadakan musyawarah khusus untuk perencanaan Blt-dd dengan persentase 78% pada tabel 4.15 tanggapan responden tentang pemerintah desa mensosialisasikan program blt-dd kepada masyarakat dengan persentase 67%, sehingga sehingga hasil rekapitulasi dari keduanya yaitu 73%.

## b. Pengorganisasian

Menurut George R. Terry, pengorganisasian merupakan penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.16 tanggapan responden tentang masyarakat terlibat dalam proses pengorganisasian Blt-dd dengan persentase 68% dan pada tabel 4.17 tanggapan responden tentang koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat tentang program Blt-dd telah berjalan efisien dengan persentase 60%, sehingga sehingga sehingga hasil rekapitulasi dari keduanya yaitu 64%.

## c. Pelaksanaan

Menurut George R. Terry, pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.18 Tanggapan responden tentang persyaratan dan mekanisme penyaluran Blt-dd telah disosialisasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa dengan persentase 59%, tabel 4.19 Tanggapan responden tentang penyaluran Blt-dd dilaksanakan tepat waktu sesuai aturan yang ditetapkan dengan persentase 78%, dan tabel 4.20 Tanggapan responden tentang bantuan yang disalurkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan persentase 82%, sehingga hasil rekapitulasi dari ketiga tabel yaitu 73%.

## d. Pengawasan

Menurut George Terry pengawasan dirumuskan sebagai proses apa yang harus dicapai yaitu standard apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Dalam hal ini berupa pelaporan pertanggungjawaban dan disertai dengan keterlibatan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.21 Tanggapan responden tentang laporan kegiatan program Blt-dd dan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada masyarakat dengan persentase 79% dan tabel 4.22 tanggapan responden tentang masyarakat dilibatkan dalam mengawasi penyelenggaraan program Blt-dd dengan persentase 67%, sehingga hasil rekapitulasi dari keduanya yaitu 73%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Indikator transparansi pemerintah desa (X) yang terdiri dari informasi yang memadai, informasi mudah didapat, media informasi yang baik, dan sikap terbuka pemerintah menggunakan tabel frekuensi dan rumus rekapitulasi diperoleh dengan hasil persentase 66% termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan tingkat transparansi pemerintah desa yang cukup baik, ini menandakan bahwa ada upaya yang signifikan dari pemerintah desa untuk mengupayakan transparansi yang jelas dan mudah. Namun, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor apa saja yang dapat meningkatkan transparansi tersebut, seperti penyediaan informasi secara terperinci dan berkala dengan pemanfaatan media informasi dengan maksimal.
2. Indikator pengelolaan bantuan langsung tunai (Y) yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menggunakan tabel frekuensi dan rumus rekapitulasi diperoleh dengan hasil persentase 71% termasuk dalam kategori baik. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan program Blt-dd telah cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan evaluasi lebih lanjut untuk membantu mengidentifikasi are-area yang perlu ditingkatkan, yakni sosialisasi dengan baik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Blt-dd.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



3. Transparansi pemerintah desa memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai. Signifikansi pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dengan nilai signifikansi  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau  $3.458 > 1.671$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Berdasarkan analisis diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif secara signifikansi transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

## REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah*. Graha Ilmu.
- Agustin, H., Marganda, I. P., & Purba, H. (2021). Penerapan Asas Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *Tjybjb.Ac.Cn*, 27(2), 58–66.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Penerbit Gava Media.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 64, 401–420.
- Damayanti, D. C. (2022). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran*.
- Dwi Herlinda, Elly Nielwaty, & Pebriana Marlinda. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(3), 135–143. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33606/31801>
- Firdaus, R. (2022). *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*. 5(April), 44–52.
- Hariri, A. (2019). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799>
- Irma Dwi Damayanti, Amni Zarkasyi Rahman, R. H. (2022). *IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI DESA BOTORECO KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA Irma*.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. *E-Book*, 1–26.
- Lianingrum, I. G., & Mimba, N. P. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19*. 4(6), 8478–8491.
- Nadeak, I. J. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektifitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 119–140.
- Ndoda, T. (2022). *Transparansi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu*.
- Parwati, Y. D. (2022). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid-19*. 19.
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Rais Rahmat Razak, M., & Sailan, M. (2022). Village Fund Governance Based on Accountability Principles, Transparency and Public Participation. *IOSR Journal Of Humanities And Social*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



- Science (IOSR-JHSS*, 27(11), 13–19. <https://doi.org/10.9790/0837-2711021319>
- Sellang, K., Ahmad, J., & Mustanir, A. (2019). *Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. August*, 1–168. [https://play.google.com/store/books/details/Kamaruddin\\_Sellang\\_S\\_Sos\\_M\\_AP\\_STRATEGI\\_DALAM\\_PENIN?id=U06rDwAAQBAJ](https://play.google.com/store/books/details/Kamaruddin_Sellang_S_Sos_M_AP_STRATEGI_DALAM_PENIN?id=U06rDwAAQBAJ)
- Siswanto, D. (2022). *Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Selama Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu*. 91.
- Siswanto, D., Antong, & Putra, A. D. A. (2022). Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(2), 341–354. <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i2.32881>
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Sulistyo, H. W. (2015). Kelembagaan dan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Universitas Medan Area*, 15(2), 8–33.
- Suyoto, A. W., & Oktafia, R. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Blt-Desa 40% Pada Masa Pandemi Di Desa Sedayulawas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(01), 32–41. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Syahputra, D. R., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 51–56.
- Tenggulang, B. (2023). *Bansos BLT Dana Desa 2023*. Trnggulangbaru.Id. <https://tenggulangbaru.id/artikel/2023/1/31/bansos-blt-dana-desa-2023-dapat-rp-300000-ini-syaratnya>
- Triana, E., & Rahman, A. (2018). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, 5(Maret 2018), 432.
- Wulandari, T., Ahyaruddin, M., & Armel, R. S. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>
- Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 338–351. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>